

BAB I

PENDAHULUAN

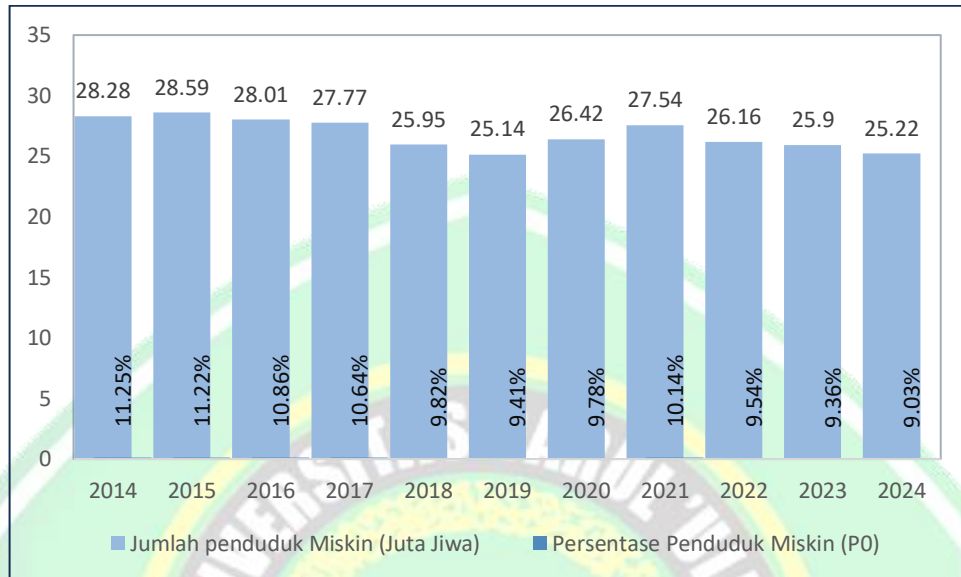
1. 1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia merupakan isu yang senantiasa menjadi prioritas dalam agenda pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan ini menjadi begitu menarik untuk dibicarakan. Menurut *World Bank* (2019), hal-hal tersebut diantaranya pertama, prioritas dalam proses pembangunan salah satunya adalah penurunan kemiskinan. Kedua, untuk meningkatkan kemudahan dalam identifikasi penduduk miskin. Ketiga, dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai program atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Terakhir, sebagai evaluasi terhadap efektivitas lembaga pemerintah dalam menangani kemiskinan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sepakat dengan 17 program *Sustainable Development Goals (SDG's)* dari total 193 negara yang juga menyepakatinya. Dimana secara tidak langsung, Indonesia dituntut agar dapat mencapai target pembangunan yang telah dituangkan dalam deklarasi SDG's tersebut (Adhitya et al., 2022). Tujuan dari SDG's itu sendiri adalah menggapai visi bersama yang komprehensif yakni fokus menangani permasalahan pembangunan diantaranya ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimana salah satu programnya yaitu membahas terkait pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama yang diupayakan oleh seluruh negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia (Ramdani, 2015). Adhitya (2022) mengungkapkan bahwa menurunkan angka kemiskinan adalah suatu hal yang tidak mudah, karena memerlukan waktu yang

cukup lama. Di berbagai negara, umumnya setiap tahun angka kemiskinan hanya bisa turun kurang dari dua persen. Begitu pula hal yang terjadi di Indonesia, berikut ini data yang dirangkum dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.



Sumber: data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Gambar 1.1
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Periode 2014-2024

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, pada periode Maret 2014-Maret 2024 di Indonesia tingkat kemiskinan cenderung alami penurunan, baik itu jumlah penduduk ataupun persentase. Maret 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia didapati 11,25% terhitung jumlah penduduk miskin 28,28 juta jiwa, berikut menurun sebesar 0,03% sehingga di tahun 2015 tingkat kemiskinan menjadi 11,22%. Turun Kembali di tahun 2016 sebesar 0,36% sehingga tingkat kemiskinan kala itu berada di angka 10,86%. Penurunan tingkat kemiskinan secara berurut-turut dari tahun 2017-2019 sebesar 0,22 % kemudian 0,82% dan 0,42% sehingga tingkat kemiskinan di tahun 2019 menyentuh angka 9,41%.

Tahun 2020 dan 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,37% dan 0,36% sehingga angka tingkat kemiskinan meanjadi sebesar

10,14% di tahun 2021. Sementara di tahun berikutnya 2022 hingga 2024, terjadi penurunan kembali sebesar 0,6% sehingga tingkat kemiskinan menjadi 9,55%. Kemudian turun lagi 0,18% di tahun 2023 dan 0,33% sehingga tingkat kemiskinan ketika 2024 mencapai 9,03%. Dapat dilihat bahwa penurunan tingkat kemiskina di Indonesia periode Maret 2014-Maret 2024 berkisar antara 0,03% hingga 0,82% tidak satupun mencapai satu persen.

Menurut Adhitya (2022), upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan perencanaan yang sistematis, berkelanjutan, dan bertahap. Selain itu, diperlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sejumlah kajian telah dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat serta menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan. Namun, permasalahan ini masih belum terselesaikan secara optimal. Purnomo (2021) mengemukakan dua penyebab utama dari kondisi tersebut. Pertama, kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Kedua, keterbatasan validitas data mengenai klasifikasi ekonomi masyarakat menghambat perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

Berbagai program telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah, antara lain Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi, serta Jaringan Pengaman Sosial di sektor kesehatan. Selanjutnya, pemerintah juga meluncurkan program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Penanggulangan Kemiskinan di wilayah perkotaan. Beragam program yang telah dijalankan tersebut dinilai belum mampu memberikan

hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan kemiskinan (Solikaturun *et al*, 2014).

Langkah strategis dalam menekan dan menangani tingkat kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terperinci, tidak bisa dipisahkan dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Pendekatan ini memungkinkan tindakan lebih tepat sasaran, menyentuh langsung akar permasalahan yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Penting adanya dukungan dari pemerintahan pusat juga daerah untuk menangani berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun infrastruktur (Annur, 2013).

Di Indonesia pembangunan infrastruktur masih terus digencarkan. Tidak hanya di perkotaan saja, bahkan pembangunan infrastruktur sudah menyentuh daerah-daerah pedesaan, termasuk di Kabupaten Jombang. Menurut informasi yang diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik, berikut ini disajikan data mengenai jumlah sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Jombang.

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA Di Kabupaten Jombang

Sekolah di Kabupaten Jombang					
No	Tahun	SD	SMP	SMA	Jumlah Sekolah (unit)
1	2014	823	248	190	1261
2	2015	820	251	189	1260
3	2016	816	250	192	1258
4	2017	811	259	198	1268
5	2018	815	262	200	1277
6	2019	827	263	206	1296
7	2020	821	265	207	1293
8	2021	808	267	208	1283
9	2022	809	272	210	1291
10	2023	799	275	214	1288
11	2024	801	276	214	1291

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2024

Terlihat pada tabel 1.1 di atas, bahwa infrastruktur pendidikan di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi yang kecenderungannya bertambah setiap tahun. Terdapat perbedaan kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan di perkotaan dengan pedesaan. Terutama di wilayah terpencil, institusi pendidikan kerap menghadapi keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar, seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium, serta akses terhadap jaringan internet dan teknologi pendukung pembelajaran lainnya. Keterbatasan ini menghambat kualitas pendidikan yang diterima siswa dan pada akhirnya mempengaruhi daya saing mereka dalam dunia kerja. Minimnya kesempatan pendidikan berkualitas ini berkontribusi terhadap terbatasnya akses ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Sektor pelayanan pendidikan terutama fasilitas pendidikan di daerah terpencil harus terus ditingkatkan, bahkan kebijakan tertentu juga diperlukan supaya masyarakat miskin mendapatkan kemudahan dalam menempuh pendidikan sehingga masyarakat memperoleh peningkatan dalam taraf kesejahteraan hidupnya. Pribakti (2018) menyatakan, kemiskinan bermula dari ketidak mampuan masyarakat miskin mewujudkan pendidikan yang lebih tinggi sebab biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan semakin mahal dan hingga kini program kebijakan pemerintah belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Tak hanya pendidikan, infrastruktur sanitasi layak juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif baik dalam

bidang sosial maupun ekonomi. Agar dapat mencapai taraf kesehatan yang tinggi, pemerintah harus mendukung penuh dari aspek fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik, Kamilia (2022). Berdasarkan data yang di himpun dari BPS, berikut ini ditampilkan data infrastruktur sanitasi di Kabupaten Jombang:

Tabel 1.2
Infrastruktur Sanitasi Kabupaten Jombang

Rumah Bersanitasi di Kabupaten Jombang		
No	Tahun	Rumah Bersanitasi (Persentase)
1	2014	75,56
2	2015	79,05
3	2016	81,53
4	2017	84,30
5	2018	84,72
6	2019	87,48
7	2020	88,98
8	2021	90,95
9	2022	93,67
10	2023	94,06
11	2024	94,69

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2024

Dari tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa rumah bersanitasi di Kabupaten Jombang secara persentase mengalami fluktuasi dan di tahun 2024 rumah bersanitasi layak di Kabupaten Jombang sudah mencapai angka 94,69%. Ketersediaan air bersih dan sarana pengelolaan limbah yang memadai merupakan hak dasar setiap individu yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Menurut Kamilia (2022) akses infrastruktur kesehatan menjadi faktor penting, sebab kesehatan sama halnya dengan investasi yang mana mampu meningkatkan dan mengoptimalkan produktivitas sekaligus kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sehingga meningkatkan taraf hidup. Kemiskinan menyebabkan masyarakat tinggal di lingkungan yang tidak sehat dan kurang

memiliki pengetahuan memadai mengenai kesehatan, sehingga hal ini menyebabkan kelompok masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Akibat dari kemiskinannya itu, ketika jatuh sakit mayoritas dari masyarakat Indonesia tidak bisa membayar biaya perawatan yang ada. Fenomena ini terjadi karena pendapatan yang diperoleh hanya cukup bahkan habis untuk memenuhi kebutuhan pokok harian tanpa bisa mementingkan kesehatan. Permasalahan ini tentu mempengaruhi produktivitas, yang mana otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya (Pribakti, 2018). Berikut ini data infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Jombang:

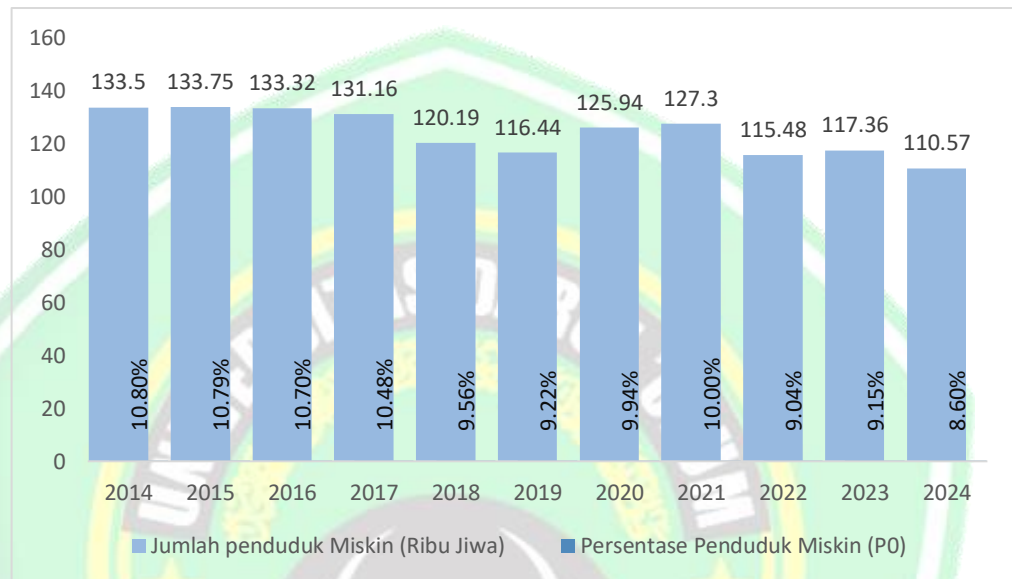
Tabel 1.3
Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Jombang

Infrasrukur Kesehatan Kabupaten Jombang		
No	Tahun	Total (Unit)
1	2014	1946
2	2015	1941
3	2016	1942
4	2017	1957
5	2018	1978
6	2019	1972
7	2020	1977
8	2021	1989
9	2022	1982
10	2023	1990
11	2024	1991

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2024

Berdasarkan informasi yang disajikan tabel 1.3 terlihat setiap tahun infrastruktur kesehatan kecenderungannya terus bertambah. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk menjaga dan memulihkan kesehatan mereka, sehingga dapat terus produktif dan berkontribusi pada perekonomian keluarga. Dengan melakukan upaya ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Parameter yang dapat diaplikasikan untuk melihat tingkat kemiskinan diantaranya berupa presentase penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan. Dalam penelitian ini, variabel tingkat kemiskinan direpresentasikan dengan data presentase penduduk miskin. Berikut ini adalah diagram tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang selama 10 tahun terakhir.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2024

Gambar 1.2
Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2024

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut, terlihat total masyarakat miskin di Kabupaten Jombang berfluktuasi. Ketika memasuki periode maret 2014-maret 2015 terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang turun sebesar 0,01% dari angka 10,80% menjadi 10,79% di tahun 2015 dengan total masyarakat miskin sebanyak 133,75 ribu jiwa. Di 2016 terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 0,32% atau sebanyak 0,43 ribu jiwa sehingga menjadi 133,32 ribu jiwa, mengalami penurunan tingkat kemiskinan 0,09% sehingga angka kemiskinan saat itu menjadi 10,7%. Kemudian pada periode berikutnya menurun kembali sebesar 1,62% atau 2,16 ribu jiwa dari yang semula 133,32 ribu jiwa di tahun 2016 menjadi 131,16 ribu

jiwa dan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,22% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sehingga menempati angka 10,48% di tahun 2017.

Di tahun berikutnya, terjadi penurunan penduduk miskin yang sangat drastis sebesar 8,36% atau sebanyak 10,97 ribu jiwa terlepas dari kondisi kemiskinan menyisakan sebanyak 120,19 jiwa penduduk miskin pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya sejumlah 131,16 ribu jiwa, dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,92% sehingga tingkat kemiskinan menjadi 9,56% pada tahun 2018. Penurunan angka tingkat kemiskina terjadi kembali periode Maret 2018-Maret 2019, tercatat penurunan penduduk miskin sebesar 3,12% atau 3,75 ribu jiwa sehingga menyisakan 116,44 ribu jiwa yang masih dalam kondisi miskin dengan tingkat kemiskinan berada pada angka 9,22%.

Sementara itu tahun 2020, tingkat kemiskinan alami kenaikan 0,72% sehingga menyenuh angka 9,94% dan total penduduk miskin 125,94 ribu jiwa, dimana pertambahannya sekitar 8,16% atau sebanyak 9,5 ribu jiwa. Kemudian di tahun 2021 angka tingkat kemiskinan naik lagi sekitar 0,06% terus menyentuh 10% dengan penambahan penduduk miskin sebesar 1,08% atau 1,36 ribu jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 127,30 ribu jiwa. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang tentunya memiliki dampak pada perekonomian masyarakat kala itu. Kemudian di tahun 2022 pasca pandemic covid-19, angka tingkat kemiskinan menurun kembali di angka 9,04% dengan penurunan penduduk miskin sebanyak 11,82 ribu atau sebanyak 9,29% masyarakat terlepas dari kondisi kemiskinan sehingga menyisakan 115,48 ribu jiwa yang masih dalam kondisi miskin.

Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang kembali mengalami kenaikan sebesar 0,11% menjadi 9,15% dengan pertambahan penduduk miskin 1,63% atau sekitar 1,88 ribu jiwa dengan total jumlah penduduk miskin sebanyak 117,36 ribu jiwa. Terakhir, pada maret 2024 angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang tercatat mengalami penurunan sebesar 0,55% hingga mencapai angka 8,60% dengan jumlah total penduduk miskin sebanyak 110,57 ribu jiwa.

Dari data yang disajikan oleh BPS, terlihat bahwa kecenderungan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang menurun. Namun, penurunan ini terjadi sangat kecil, berkisar pada angka 0,01-0,96% atau dengan kata lain tidak sampai angka 1% yang mana dapat dikatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang terjadi sangat kecil. Dimana rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir masih ada sekitar 114,15 ribu jiwa masyarakat Jombang masih hidup dalam kondisi miskin.

Peran infrastruktur dalam menurunkan tingkat kemiskinan sangat erat kaitannya dengan akses terhadap layanan-layanan infrastruktur yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Infrastruktur memberikan dampak positif terhadap SDGs melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, teknologi informasi, dan sanitasi dasar, Anggraeni (2019).

Anggraeni (2019) mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan. Meskipun pemerintah Indonesia telah

menerapkan kebijakan pembebasan SPP pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun beban biaya tambahan seperti pembelian buku dan seragam sekolah masih tergolong besar, sehingga menjadi hambatan bagi keluarga kurang mampu.

Anggraeni (2019) pendidikan determinan utama dalam persoalan kemiskinan, sehingga perlu banyak pertimbangan dalam perancangan dan implementasi program pengentasan kemiskinan. Pendidikan tentu dapat meningkatkan potensi penghasilan individu sehingga membantu mereka keluar dari kemiskinan. Kemudian *World Bank* dalam Anggraeni (2019) menyatakan bahwa kemiskinan dan kesehatan sesungguhnya saling bersinergi. Keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses fasilitas layanan kesehatan.

Kondisi saat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dapat dikatakan sebagai miskin (Priseptian & Primandhana, 2022). Dengan kata lain kemiskinan merupakan problematika terkait standar hidup yang rendah di mana hal ini berhubungan dengan pendapatan rendah, rumah tidak layak huni, tingkat pendidikan rendah, serta akses akan fasilitas kesehatan dan fasilitas sanitasi yang tidak sesuai standart. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur dasar bertujuan agar setiap orang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga terbebas dari kemiskinan.

Hubungan antara infrastruktur pendidikan, infrastruktur sanitasi dan infrastruktur kesehatan dengan tingkat kemiskinan menurut Anggraeni (2019), sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan hasil dari kualitas infrastruktur pendidikan yang, sementara infrastruktur sanitasi dan

infrastruktur kesehatan yang memadai akan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sehat dan produktif. Sehingga ketiga infrastruktur sektor tersebut berperan saling mendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini akan membahas pengaruh infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur sanitasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang, yang mana dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana peningkatan infrastruktur dasar memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang. Selain itu penelitian ini diharapkan juga memberikan wawasan lebih jelas tentang pentingnya investasi dalam infrastruktur dasar sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang berbasis pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar dapat menjadi solusi mengatasi kemiskinan jangka panjang sekaligus memperkuat pondasi pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik pembahasan mengenai “Pengaruh Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Infrastruktur Sanitasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jombang Tahun 2024”.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana pengaruh infrastruktur sanitasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang?
4. Bagaimana pengaruh infrastruktur pendidikan, infrastruktur sanitasi, dan infrastruktur kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur sanitasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.
3. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.
4. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.

1. 4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur sanitasi terhadap tingkat kemiskinan

khususnya di Kabupaten Jombang. Serta dapat menjadi referensi atau tolak ukur pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang terkait pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Jombang.

Selain itu, diharapkan teori kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait hubungan tingkat kemiskinan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur sanitasi, sehingga memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Diharapkan juga penelitian ini menjadi rujukan pembelajaran selama perkuliahan serta dapat menambah wawasan untuk kehidupan yang akan datang.

